UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan
Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024**
Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv

KATA PENGANTAR v

INTISARI ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

1. Tujuan Objektif 10

2. Tujuan Subjektif 11

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoretis 11

2. Manfaat Praktis 11

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum tentang Kewengangan Pemerintahan 15

1. Pengertian dan Sumber Kewenangan 15

2. Atribusi, Delegasi, dan Mandat 16

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan
Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024**
Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 17
1.Konsep Otonomi Daerah 17
2. Desentralisasi Fiskal dan *Local Taxing Power* 17
3. Batas Kewenangan Daerah dalam Memungut Pajak 19
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah 19
1.Pengertian, Fungsi, Asas Legalitas Pajak, dan Prinsip Pengenaan Pajak 19
2.Klasifikasi Pajak Daerah Pasca UU HKPD 22
D. Pajak Barang dan Jasa Tertentu dalam UU HKPD 23
1.Karakteristik dan Objek PBJT 23
2.Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai Objek PBJT 24
E. Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan Tradisional 24
F. Kedudukan dan Daya Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi 27
1.Sifat Final dan Mengikat 27
2.Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi 29
3.Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Norma Turunan 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sifat Penelitian 31
B. Data Penelitian 31
1.Bahan Hukum Primer 32
2.Bahan Hukum Sekunder 33
3.Bahan Hukum Tersier 33
C. Cara Pengumpulan Data 34
1.Teknik Pengumpulan Data 34

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024
Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Alat Pengumpulan Data 35
D. Analisis Data 35
E. Jalannya Penelitian 36
F. Kendala dalam Penulisan Hukum 37
BAB IV PEMBAHASAN 39
A. Kedudukan Hukum Jasa Spa sebagai Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dalam Kerangka UU HKPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 39
1. Norma Asal dan Pergeseran Maknanya 39
2. Duduk Perkara: Permohonan dan Dasar Pengujian Konstitusional 43
3. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 44
4. Implikasi Penolakan Dalil Tarif terhadap Kepastian Hukum 49
5. Kedudukan Spa dalam Struktur PBJT: Dua Lapis Kedudukan Hukum . 51
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memungut Pajak atas Jasa Spa secara Konstitusional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 53
1. Sumber dan Karakter Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memungut Pajak 53
2. Daya Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah: Erga Omnes dan Konsekuensinya 55
3. Analisis Peraturan Daerah: Kota Denpasar, Kota Bandung, dan Kota Surabaya 57

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan
Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024**
Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4. Batas Konstitusionalitas: Kapan Pemungutan Pajak Spa Menjadi Rawan Digugat? 62
5. Prinsip *Closed List System* sebagai Pengaman Sekaligus Batasan Kewenangan 64
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 73